

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam pandangan Maswadi Rauf-memijam *term* Geoff Mulgan-, demokrasi adalah salah satu bentuk, -sistem dan pola pengaturan politik¹. Dalam praksisnya demokrasi adalah sintesa dari tarik-menarik dan tawar-menawar antar kekuatan. Dalam sejarahnya, disebutkan bahwa perkembangan demokrasi dunia telah dimulai lebih dari 200 tahun, bertitik tolak pada perhitungan Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776.

Diantara itu, demokrasi tentu saja tidak muncul tiba-tiba sebagaimana pada bentuk-bentuk demokrasi yang ada dihadapan kita sekarang, demokrasi dengan berbagai macam corak dan bentuk. Dilihat dari sudut pandang kesejarahan lain, tumbuh-berkembangnya demokrasi ternyata telah berlangsung pesat sejak abad ke-16 pada saat diprawacanakan. Pada tahun itu diskursus demokrasi bergulir dengan berbagai dinamika dan perdebatan yang terjadi, dengan demikian usia demokrasi sebenarnya sudah lebih dari 500 tahun.

Lalu, apa yang mendasari demokrasi mampu bertahan sedemikian rupa sehingga hampir sebagian besar para pemikir sosial-politik kenegaraan berpandangan bahwa, ideologi dan sistem demokrasi adalah pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak lain karena (a)demokrasi menawarkan penghargaan pada individu. Dalam demokrasi, (b)kepentingan rakyat adalah

¹ Maswadi Rauf, *Sebuah Pengantar: Mengungkap Masa Depan Dunia Politik*, dalam Geoff

pedoman kerja bagi para penguasa politik dan (c)kekuasaan penguasa politik dapat dilepaskan apabila sudah tidak lagi membela kepentingan rakyat. Dalam pengertian, dalam demokrasi seseorang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam negara. Pandangan ini akhirnya mengukuhkan demokrasi sebagai alternatif yang jauh lebih baik dari monarki atau teokrasi dimana kedua sistem yang disebut terakhir sebagai sistem absolut, termasuk juga pada sistem lain seperti aristokrasi dan oligarki.

Aristoteles membagi enam bentuk sistem pemerintahan² yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik kontitusional dan terakhir demokrasi itu sendiri. Yang dimaksud monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh hanya satu orang saja, namun pemerintahan ditujukan untuk kepentingan umum. Makna yang berkebalikan dengan sistem tirani dimana pemerintahan ditujukan hanya untuk dan oleh penguasa sendiri dan kekuasaan berada pada satu orang.

Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh dan terdiri dari beberapa orang-orang yang -Aristoteles sebut- memiliki sifat baik, sedangkan oligarki adalah kebalikannya. Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh hanya beberapa orang, namun memiliki sifat yang tidak baik karena pemerintahan hanya ditujukan pada golongan atau kelompok orang yang ada dalam pemerintahan. Republik konstitusional adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat berdasar kontitusi. Sebaliknya, demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasar prinsip partisipasi kerakyatan, namun kenyataannya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Aristoteles memandang bahwa demokrasi adalah sistem

² M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII Press Yogyakarta 2000 hal 38, dikutip dari Plato, *The Republic*, terjemahan HDB Lee, The Penguin Classics, London

yang jelek³. Tidak salah jika kemudian Geoff Mulgan juga pada akhirnya meragukan nilai baik demokrasi⁴.

Di Indonesia, terjadi sistem campuran yang berkelit-kelindan sehingga tidak diketahui sistem apa yang dianut. Dalam sejarah Indonesia modern, demokrasi disebut-sebut sebagai sistem pemerintahan yang dipilih dengan berbagai modifikasi, dibuktikan dengan --setelah proklamasi 17 Agustus 1945- Indonesia pernah menjalani masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan setelah gerakan reformasi saat ini disebut dengan Demokrasi Kerakyatan. Dalam kenyataannya, sistem-sistem yang disebut Aristoteles diberlakukan secara bersamaan, dari monarki hingga demokrasi dimainkan oleh aktor-aktor politik kita.

Diantara itu ternyata demokrasi di Indonesia tetap diyakini menjadi salah satu perspektif mengharukan dan memberikan sebuah pengharapan akan lahirnya sebuah sistem yang mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan pendistribusian keadilan ke berbagai pelosok kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam sejarah kenegaraan, demokrasi juga telah memunculkan ketakutan yang luar biasa, dimana ketika demokrasi gagal diimplementasikan sebagai sebuah sistem integral nilai yang utuh dan mampu menyalurkan keadilan kolektif kepada seluruh warga negara. Wajah damai demokrasi sebagai nilai integral menjadi paradok pada tingkat aplikasinya.

Selaras dengan hal itu, AM Fatwa kemudian memaknai demokrasi sebagai sistem mekanisme, cara dan wahana. Untuk memahami esensinya AM Fatwa

Hingga akhirnya, daerah harus kehilangan identitasnya sebagai sebuah ciri khasnya.

Strategi pembangunan pun menggunakan azas satu untuk semua, yang sama sekali tidak menghiraukan heterogenitas aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik lokal. Sehingga lahirlah sebuah pemaksaan struktural dimana daerah-daerah di negeri ini harus mengatakan 'ya' terhadap segala instruksi yang berasal dari kerajaan pusat. Sukses daerah pun bahkan menjadi ketentuan yang berasal dari kekuasaan pusat, 'ya' tentunya dengan maksud untuk menopang dan melanggengkan kekuasaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pada masa Demokrasi Pancasila, pemerinatah Orde Baru telah menempatkan kekuasaan pemerintah pusat sebagai titik *ordinat* dan menempatkan daerah sebagai *satelit* atau bagian yang tak diperhitungkan karena dianggap kekuatan pinggiran. Daerah menjadi obyek yang tereksplorasi, dengan menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara dan meminimalisir pembangunan lokal. Sehingga tidak aneh jika kita menyaksikan terjadinya kesenjangan yang luar biasa antara pusat dan daerah, baik dipandang dari kacamata ekonomi, pendidikan, partisipasi politik dan lain sebagainya.

Pada rezim Orde Baru berkuasa, teriakan-teriakan kebenaran yang muncul sebagai reaksi terhadap aspirasi rakyat yang terabaikan dianggap sesuatu yang dapat merusak wibawa penguasa atau bahkan mengusik ketenangan kekuasaan.

Maka kebebasan berekspresi dipasung dengan tindak represifitas negara. Banyak

aktivitas aktif yang mendekati dalam tekanan atau bahkan yang hilang setelah

dimana keberadaannya. Sedikit sekali pada saat itu orang-orang yang berani mengkritisi penguasa, apalagi hal tersebut muncul dari putra lokal (daerah).

Selama masa Orde Baru, meski tindak represifitas negara sangat ketat, namun bukan berarti tidak ada aktor yang berani melakukan gugatan, tentunya dengan cara sesuai dengan kaidah kontitusi dimana *rule of law* menjadi acuan dan dijunjung tinggi. Aktor-aktor itu terdiri dari aktor kolektif dan personal. Kolektif dimaknai dengan adanya keterlibatan unsur-unsur lain dalam bentuk kelembagaan atau institusi dan aktor personal menempatkan individu sebagai pelaku.

Adalah Ismail Suko, lahir pada 15 Juni 1932 di Pasir Pangarayan, desa Muara Nikum, kecamatan Rambah Hilir, (sekarang) kabupaten Rokan Hulu. Dibesarkan dalam keluarga petani dengan hidup serba apa adanya dan doktrin budaya Melayu yang kental. Ismail Suko merupakan salah satu putra Riau yang ikut mengalami getirnya konstelasi konflik perpolitikan antara pusat dan daerah pada tahun 1985 dan sebagai salah satu aktor utama didalamnya⁶.

Puncak konflik itu terjadi pada 2 September 1985 (diistilahkan dengan peristiwa September Kelabu) pada saat Ismail Suko memenangkan pemilihan gubernur Riau dalam sidang pleno DPRD-Riau. Peristiwa tersebut terjadi pada periode pertama Imam Munandar sebagai Gubernur Riau berakhir. Setelah satu periode memimpin Riau, Imam Munandar masih berminat untuk mencalonkan diri pada periode kedua tahun 1985. Pada saat itu ada tiga calon yang masing-masing didelegasikan oleh Golkar (golongan karya), yaitu H. Imam Munandar

⁶ Thelih Mustamin & Samir Sofyan, *Ismail Suko mantan Damabasi dari Riau: Yayasan teman*

(Gubernur Riau), H. Abdul Rachman Hamid (Pembantu Gubernur di Tanjung Pinang), dan Drs. H. Ismail Suko (Sekretaris DPRD Riau)

Ketiga calon tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilangsungkan pemilihan dalam sebuah sidang pleno DPRD-Riau tanggal 2 September 1985. Ternyata hasil pemilihan tersebut diluar dugaan banyak orang dimana Ismail Suko yang pada saat itu tidak diperhitungkan menjadi pemenang dengan 19 suara, sementara Imam munandar memperoleh 17 suara dan Abdul Rachman Hamid memperoleh 1 suara⁷.

Hasil tersebut tentu mengagetkan banyak pihak, terutama pemerintah pusat. Skema besar politik untuk daerah Riau mengalami perubahan drastis. Sementara kondisi yang berbeda terjadi pasca pemilihan di kantor DPRD Riau, dimana suasana suka cita menyelimuti keadaan pada saat itu, ucapan selamat pun menghampiri Drs. Ismail Suko yang terpilih menjadi Gubernur Riau pada saat itu.

Kondisi tersebut tentunya mencengangkan sekaligus mengejutkan, 'putra daerah' berhasil menduduki kursi pertama pemerintahan daerah Propinsi Riau. Selama Orde Baru memimpin, merupakan sebuah kemustahilan putra daerah apalagi yang bukan berasal dari golongan militer berhasil menduduki kursi Gubernur. Guncangan politik pun datang silih berganti menghampiri Ismail Suko. Di mulai oleh Syarifudin Syarif, Bupati Kampar pada saat itu yang mengatakan bahwa:

Sebagaimana bapak ketahui bahwa tadi sudah dilakukan pemilihan gubernur dalam sidang pleno DPRD Riau, hasilnya bapak mendapatkan suara terbanyak. Walaupun bapak mendapat suara terbanyak dapat dipastikan bahwa bapak belum

tentu menang. Sebab sebagaimana bapak ketahui, daerah Riau ini yang bisa di angkat menjadi Gubernur adalah ABRI, bukan sipil. Sipil tidak bisa jadi Gubernur di Riau, yang bisa hanya ABRI⁸.

Pernyataan tersebut tentunya memberikan sinyal yang kuat bahwa terpilihnya Ismail Suko sebagai Gubernur Riau pada saat itu akan melahirkan konsekuensi politik tersendiri bagi seorang Ismail Suko.

Atas desakan dari berbagai pihak pada saat itu, H. Imam Munandar, Sudharmono SH yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum DPP Golkar yang meminta beliau untuk mengundurkan diri dari pencalonan Gubernur. Maka tidak lama berselang surat pengunduran diri pun dipersiapkan yang oleh waktu itu dibuat oleh Drs. H. Baharuddin Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD Golkar Riau. Pada saat surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Sudharmono SH yang berkedudukan di Jakarta. Desakan struktural dan mengingat keselamatan diri dan keluarga maka Ismail Suko pun harus merelakan posisi Gubernur yang telah di perolehnya. Matinya nilai-nilai luhur demokrasi pada saat itu telah menjadi rahasia umum, dimana tidak ada otoritas lain yang dapat menentukan sebuah kebijakan melainkan yang berasal dari kekuasaan pusat.

Sejarah kini telah berganti, rezim Orde Baru telah digulingkan, reformasi pun menjadi agenda utama terhadap penentuan masa depan bangsa dimasa-masa selanjutnya. Seiring dengan berjalannya agenda reformasi, pelaksanaan demokratisasi ditingkat lokal pun kini digulirkan. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan otonomi daerah. Masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Ismail Suko dalam perpolitikan lokal di Riau tahun 1985-2003.

C. BATASAN MASALAH

1. Peran Ismail Suko Pada saat menjadi pejabat Segneg di Jakarta
2. Peran Politik Ismail Suko dalam peristiwa 2 September 1985
3. Peran Ismail Suko setelah tragedi 1985

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang peranan yang dilakukan oleh elite-elite daerah dalam perpolitikan lokal, dalam hal ini mengambil studi kasus tentang peranan Ismail Suko dalam perpolitikan lokal di Riau
2. Untuk mengetahui perkembangan perpolitikan lokal

Harapan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah bermanfaat bagi kami, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa dan sebagai pengukuhan terhadap khittah perjuangan generasi penerus bangsa yang hingga hari ini masih larut dalam arus besar budaya massa yang kemudian menghilangkan semangat kebangsaan.

Secara akademik penelitian ini memiliki manfaat terhadap penambahluasan terhadap wacana teori elite politik dan politik daerah

E. KERANGKA TEORI

Teori adalah pernyataan *explanatori* umum yang melibatkan entitas yang tidak dapat diobservasi secara spesifik. Teori dapat pula berupa usulan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara tertentu seperti fiksi yang bermanfaat atau model eksplanatori. Sedangkan teori politik adalah sebagai upaya sistematis untuk memahami makna dan arti penting kehidupan politik. John Nelson menyajikan uraian bermanfaat tentang tujuan-tujuan praktik teori politik. Ia berpendapat bahwa tujuan-tujuan teori politik dapat dirangkum dalam pengertian tiga C yaitu: *comprehend* (memahami), *conserve* (memelihara), dan *criticize* (mengkritik)⁹.

Memahami disini merujuk pada dua tujuan berupa penjelasan dan pemahaman. *Pertama*, teori-teori memberikan suatu kosakata konseptual bagi penggambaran dan perhitungan cirri-ciri terpenting kehidupan politik dan saling keterkaitan mereka, maupun untuk memperhitungkan bentuk-bentuk dan perilaku-perilaku yang biasa ditemukan dalam praktik politik. Teori politik mengeksplorasi fenomena-fenomena politik lewat analisisnya dalam konteks pengalaman manusia. Tujuan *kedua*, 'conserve' atau memelihara berkonotasi bahwa sejarah pemikiran politik membantu pemeliharaan suatu warisan budaya. *Ketiga* mengidentifikasi 'criticize' sebagai satu tujuan para mahasiswa ilmu politik berarti menggarisbawahi fakta bahwa teori menganalisis dan mengevaluasi, baik argumen-argumen politis maupun fenomena-fenomena politik. Teori politik juga dapat membentuk cara pandang kita terhadap politik dan memberikan wawasan ke

⁹ Lihat Joseph Leonard Williams, *Political Theory: Kritik dan Kontemporer edisi kedua*. PT

dalam masalah-masalah dan kesempatan yang diberikan oleh kehidupan politik. Ia dapat membatasi visi maupun memperluas horizon kita.

Dari rangkain penjelasan diatas maka untuk menjelaskan fonemana peran Ismail Suko terhadap perpolitikan di Riau maka penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut :

1. Teori Struktural :

1.1 Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan perspektif pemikiran sosiologis yang sangat berpengaruh, terutama tahun 1960-an. Begitu berpengaruhnya, sehingga setidaknya-tidaknya hingga dua dekade setelah perang dunia II, perspektif ini boleh dikatakan identik dengan sosiologi itu sendiri.

Pengaruhnya yang besar itu d capai sebagai implikasi dari perjalanan tradisi ini yang begitu panjang dalam sejarah teori sosial. Kalau kita menelusuri elemen filosofinya kita akan sampai ke pemikiran filsafat dan politik pada masa Yunani. Namun, biasanya para teoritisi cenderung memulai mencatat tradisi ini dari masa *Agus Comte (1798-1857)*¹⁰.

Comte yang menelurkan filsafat positivistik ini memiliki pandangan bahwa pengetahuan dan masyarakat dalam proses transisi secara evolusi. Tugas teori sosial dalam hal ini kemudian adalah memahami faktor-faktor yang tak terelakkan dan memang diperlukan bagi tumbunya sejarah evolusi masyarakat.

Muara dari semua itu adalah untuk membawa kehidupan masyarakat dalam tertib

sosial yang baru, evolusi menuju tertib sosial baru itu ditempuh melalui tiga tahap

yaitu tahap teologis, tahap metafisik atau abstrak. Atau tahap ilmiah atau positif, yakni sebuah sebab atau awal dan akhir dari suatu fenomena dan semesta ini (universe). Positivisme memberikan kunci pencapaian tujuan manusia dan positivisme merupakan satu-satunya formasi sosial yang betul-betul bisa dipercaya keandalan dan akurasinya yang seharusnya dipegang oleh semua manusia.

Comte percaya bahwa masyarakat selalu tumbuh berkembang melalui tiga tahap, sesuai dengan perbedaan tingkat kompleksitas yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Supremasi pengetahuan alam yang memakai hukum positif seperti matematika, astronomi, fisika dan biologi berlaku juga dalam politik dan titik kulminasinya.

Pemikir yang di pengaruhi positivisme Comte ini antara lain adalah, *Herbert Spencer* (1820-1903) yang memandang bahwa perubahan sosial berlaku secara paralel sebagaimana perubahan spesies, sebuah perspektif yang kemudian juga dikembangkan oleh Charles Darwin, yang lalu melahirkan teori Darwinsime sosial. Sudah barang tentu, *Emile Durkheim* (1859-1917) haruslah disebut secara eksplisit disini sebagai pemikir yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Comte dan Spencer tersebut diatas. Durkheim percaya bahwa masyarakat bisa dikaji atas dasar investigasi rasionalisme positivistik. Dari sinilah kemudian Durkheim memunculkan gagasan mengenai realitas objektif, yang ia sebut sebagai 'fakta sosial', sesuatu atau realitas yang berada diluar individu, yang menjadi sebab (causal) dari sebuah tindakan atau perubahan¹¹.

¹¹ *Ibid.*, halaman 40-41

1.2. Teori Struktural Konflik

Teori Struktural Konflik muncul sebagai pengkritik utama terhadap teori struktural fungsional. Didorong rasa tidak puas terhadap teori struktural fungsional maka sejumlah pemikir mencoba berposisi dengan membangun tradisi lain. Struktural fungsional lebih dianggap menutup mata terhadap konflik yang selalu melekat pada setiap masyarakat dari sisi keseimbangan.

Dalam pandangan struktural konflik-teori struktural fungsional terlalu berorientasi kepada status quo (*homoestatik*) padahal sesungguhnya masyarakat penuh dengan ketegangan dan selalu berposisi melakukan konflik dan senantiasa terjadi perubahan. Lebih dari itu, teori struktural fungsional dinilai mengabaikan praktik dominasi atau kelompok terhadap yang lain dan justru kelompok teori struktural fungsional dituduh dengan kelompok yang dominan¹².

Perspektif baru ini kemudian lebih menaruh perhatian terhadap ketegangan, konflik kegandrungan terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perspektif inilah yang kemudian dikenal dengan *teori struktural* konflik, yang pada awalnya dicetuskan oleh Karl Marx dan juga bisa ditelusuri dari karya-karya Max Weber. Meskipun Marx dan Weber sepakat dalam banyak hal, akan tetapi keduanya mengembangkan tipe yang berbeda. Setelah berkembang, ternyata tipe konflik Marxian jauh lebih populer dari pada tipe konflik yang dikembangkan Weber.

Konteks sosial yang mendasari munculnya perspektif ini adalah pada saat terjadinya krisis sosial akibat munculnya revolusi Industri. Marx melihat

¹² M. H. Zaidin, *Manajemen Teori Konflik*, (Jember: Jember University Press, 2010), 10.

terjadinya kemelaratan dan keserakahan ditengah masyarakat. Ia melihat gambaran penderitaan dari kehidupan kaum pekerja yang nestapa, kontras dengan gaya kehidupan kaum pemilik modal yang mewah. Para pekerja menyumbangkan banyak tenaga dan waktu tetapi tidak menikmati surplus secara sepadan yang berbeda dengan yang telah diperoleh oleh majikan.

Pikiran awal Marx amat dipengaruhi oleh munculnya industrialisasi abad XIX, yang telah melahirkan fenomena yang bertolak belakang antara buruh yang hidup menderita dan sengsara. Disatu pihak dan pemilik alat-alat produksi yang menikmati surplus yang disumbangkan oleh keringat dan tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh dilain pihak. Dari latar belakang sejarah tersebut kemudian dapat ditelusuri benang merah yang menggambarkan munculnya kondisi-kondisi yang mempengaruhi aliran Marxis awal, yaitu yang pertama munculnya tekanan struktural yang kuat terhadap individu dan kedua, kondisi industri yang memperburuk hubungan sosial yang membawa kedalam alienasi, bukan saja alienasi individual melainkan alienasi massal sejalan dengan model produksi yang dikendalikan oleh industri

Asumsi-asumsi yang mendasari teori konflik yang berakar dari Marx adalah (a) perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, (b) konflik adalah gejala yang selalu melekat dalam setiap masyarakat, (c) setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan

perubahan sosial (d) setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda-beda

dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lainnya¹³.

Dari asumsi dasar itu teori konflik kemudian mengajukan proposisi yang dapat di elaborasi menjadi sebuah strategi konflik yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik diantara dan didalam kelompok-kelompok yang bertentangan, sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik merupakan hal yang penting yang diperebutkan oleh berbagai kelompok, akibat tipikal dari konflik itu memunculkan pembagian masyarakat menjadi kelompok determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi, pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan, kelompok dan konflik sosial didalam dan diantara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial, karena konflik merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi¹⁴.

2. Teori Kausalitas

Inggris *causality*, dari bahasa latin *causa* yang berarti sebab.

Ada beberapa pengertian tentang teori kausalitas :

1. Kategori filosofis yang menunjukkan kaitan genetic niscaya antara gejala-gejala. Satu dari gejala-gejala tersebut, yang di sebut sebab akan menentukan yang lainnya yang disebut akibat atau konsekuensi.
2. Kausalitas berarti (menunjukkan) masuknya suatu sebab atas akibatnya dan juga hubungan yang muncul sebagai akibat aktivitas ini.
3. Biasanya yang di maksudkan dengan kausalitas ialah terjadinya hubungan

khusus bila seseorang membandingkan kausalitas dari suatu sebab final dengan suatu sebab efisien¹⁵.

Aristoteles membagi sebab kepada empat macam. Dari empat sebab tersebut, hanya penjelasan mekanistik yang diakui sebagai sebab yang *efisien*, seperti daya aktual akan menyebabkan adanya perubahan, sebab-sebab tersebut terbatas pada gejala akibat terdahulu. Masud atau tujuan, misalnya, adalah sesuatu yang ada dalam pikiran untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini, menurut ahli mekanik, tidak dianggap sebagai salah satu sebab.

Prinsip kausal setidaknya-tidaknya memiliki tiga penafsiran umum :

- (1) Penafsiran Empiris (empirical/posteriori interpretation). Sebab dipandang sebagai sebuah generalisasi yang berasal dari fakta-fakta dan tergantung pada fakta-fakta itu. Sebab adalah konjungsi konstan dari sejumlah peristiwa tertentu yang dapat diobservasi (Hume), bagaimanapun *a* lebih dahulu dari *b*.
- (2) Penafsiran Rasional (rational/a priori interpretation). Sebab dipandang sebagai sebuah hubungan yang harus ada (necceesary connection). Diantara dua peristiwa (Spinoza), dimana akibat yang sesuai harus mengikuti sebab, sesuai dengan prinsip nalar yang cukup (Lipniz). Kita tahu secara *a priori* bahwa kausalitas merupakan prinsip penting bagi realitas, dimana tidak akan ada suatu peristiwa yang tidak

mempunyai sebab (Determinisme), atau bahwa kausalitas adalah prinsip penting dalam ilmu pengetahuan (Khant).

- (3) Penafsiran Pragmatis (pragmatis interpretation). Sebab dipandang sebagai sesuatu hubungan yang sangat bermanfaat atau prinsip pegangan dalam penjelasan ilmiah, meskipun ada sejumlah ilmu pengetahuan yang tidak membutuhkannya. Salah satu versi diantaranya adalah teori "Receive" (resep), yakni sebab disamakan dengan sebuah resep untuk menghasilkan atau mencegah sesuatu. Kita menghasilkan B dengan membuat A dan dengan kata lain, A merupakan sebab dari B. contoh lain, kita melelehkan besi dengan memanaskannya dan karena itu dapat dikatakan bahwa pemanasan terhadap besi sebagai sebab yang meleleh. Versi lainnya menggambarkan prinsip sebab akibat sebagai sebuah proposa untuk menemukan keselarasan alam, ia semacam hukum procedural yang tidak mengandung benmar atau salah karena tidak berkaitan dengan apapun kecuali sebagai suatu cara yang baik dalam memandang atau berhadapan dengan apapun.

- (1) Kausalitas tidak sama dengan kemestian logis (logical necessity), seperti dikatakan “kucing hitam dalah berwarna hitam”.
- (2) Kausalitas dalam sains bukan hal yang menentukan, seperti halnya dalam “Hukum mengharuskan ketaatan”.
- (3) Kausalitas sebagai kondisi yang mesti ada (jika ada akibat berarti ada sebab) tidak berarti juga sebagai hubungan yang mesti ada (nessescary connection). Kondisi yang mesti ada maksudnya adalah jika suatu kondisi tertentu tidak ada maka tidak akan ada pula akibat yang ditimbulkan, misalnya “Jika tidak ada oksigen, kita tidak akan pernah memiliki api”.
- (4) Kausalitas sebagai kondisi yang memadai “jika ada sebab maka ada akibat” juga tidak berarti hubungan yang mesti ada. Kondisi yang memadai maksudnya adalah bahwa suatu kondisi tertentu selalu diikuti oleh akibat-akibat tertentu pula, misalnya “jika hujan turun, maka tanah akan basah”. Sebab sebagai keadaan yang mesti ada atau memadai adalah teori kalangan empirisme (J.S. Mille). Sebab sebagai hubungan yang penting adalah teori rasionalisme tradisional (Spinoza).
- (5) Sebab kadang diartikan sebagai keseluruhan bentuk kondisi yang memadai untuk terjadinya suatu peristiwa. Jika sebabnya satu, maka kondisi yang memadai ini juga merupakan kondisi yang mesti ada. Jika sebabnya banyak, maka kondisi yang

memadai ini bukan merupakan keseluruhan kondisi yang mesti ada.

Kausalitas Ilmiah

Kausalitas ini merupakan jenis khusus persesaban yang ditemukan dalam alam eksternal, sub spiritual. Kausalitas jenis ini berbeda dari jenis kegiatan jiwa (*psike*) atau sebab-sebab spiritual hubungan antara peristiwa-peristiwa alam tidak semata-mata merupakan hubungan fungsi matematis. Sebab, hubungan ini memenuhi pendapat tentang suatu sebab sejati. Hubungan ini jelas karena menurut prinsip kausalitas, setiap akibat memerlukan sebuah sebab. Sebab efisien yang memadai untuk menjelaskan kenyataan baru. Karena dalam alam kodrat sub-insani tidak terdapat hal seperti penentuan diri yang bebas, sebab-sebab alamiah menghasilkan akibat-akibtnya secara niscaya¹⁶.

Oleh karena itu terdapat hubungan jelas antara sebab dan akibat sedemikian rupa sehingga sebab-sebab yang sama menghasilkan akibat-akibat yang sama pula. Suatu sebab dalam dunia *sub-insani* tidak dapat menghasilkan akibat lain, yang lebih besar atau kurang dari akibat yang sesungguhnya ia hasilkan. Dalam dunia organis yang harus diperhitungkan sebagai sebab-sebab yang secara langsung menimbulkan akibat, bukan hanya daya tarik eksternal, melainkan juga situasi khusus organisme itu sendiri yang memberikan reaksi.

Sebagian besar dari efektifitas kausalitas ilmiah terletak pada daya tarik-menarik dan daya tolak menolak. Disebabkan oleh kedua kekuatan ini benda-benda berada dalam suatu hubungan timbal balik sedemikian rupa sehingga

mereka berusaha atau untuk saling mendekati atau pun untuk saling melepaskan diri. Dalam hal ini tidak akan pernah ada akibat dari jarak jauh. Maksudnya ialah suatu sebab material tidak dapat menghasilkan suatu akibat pada tempat yang berada dalam jarak yang jauh tanpa menghubungkan benda-benda yang terletak diantaranya.

3. Teori Elite

Istilah elite dalam kepustakaan ilmu sosial modern sebenarnya tidak sepenuhnya jelas. Tetapi dalam waktu bersamaan istilah ini memudahkan analisis historis kontemporer sekaligus menyediakan idiom komparasi yang mudah dipahami dan menarik, tanpa terganggu oleh rincian institusional maupun praktik budaya tertentu. Adakalanya istilah elite hendak diperjelas dengan tambahan label tertentu berdasarkan tujuannya (misalnya elite oligarkis, elite motor modernisasi)¹⁷.

Ada dua tradisi akademik tentang elite. Dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak.

Dalam pendekatan yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok baik itu kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa diberbagai sektor dan tempat. Jadi pengertian elite dipadankan dengan pemimpin,

¹⁷ Kuntz, Adam. *James J. Leary, *Elite and the Masses**. (New York: Basic Books, 1970).

pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang menjadi figur sentral.

Pendekatan kedua ini kurang normatif dalam penekannya

Elite acap kali dipandang sebagai kalangan yang mementingkan diri sendiri. Kemampuannya menguasai tatanan dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak, terlepas dari apakah kalau hal tersebut sesuai atau tidak dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jika sedang tidak berkuasa, maka elite berubah menjadi ancaman yang menakutkan karena disiplin, sumber daya dan potensi kekuatan yang diyakini mampu merombak tatanan yang ada dengan cara apapun. Kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Bertahannya pola lama atau munculnya pola baru di anggap bertolak dari kepentingan elite.

Kebanyakan ilmuwan sosial mengartikan elite sebagai 'mereka yang mengatur segala sesuatunya' atau aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan tersruktur dalam berbagai lingkup institusional-keagamaan, militer, akademis, komunikasi dan sebagainya.

Karakter elite bisa berubah-ubah. Sejumlah pengamat percaya bahwa elite memang acap kali lahir untuk mengemban misi historis. Selama beberapa abad kekuatan-kekuatan historis yang membentuk institusi-institusi modern, perkotaan, industri dan kemasyarakatan yang kian kompleks itu telah memperbesar peluang bagi siapa saja untuk menjadi elite. Sistem stratifikasi ekonomi dimana-mana berbentuk piramid, dan ini mencerminkan fakta yang nyaris universal bahwa ada sekelompok kecil yang menggenggam kekuatan terbesar. Hanya saja, keberadaan kelompok tersebut tidak lagi diwariskan, melainkan lebih ditentukan oleh faktor-

faktor lain seperti status sosial atau penguasaan institusi.

Elite adalah orang yang memegang posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lainnya melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Meskipun dipandang sebagai sebuah kelompok yang padu, masing-masing anggota elite itu sendiri-apalagi dengan elite yang lain- sering bersaing dan berbeda kepentingan.

Dalam dunia modern dimana elite dipandang sebagai kalangan orang-orang yang mapan yang punya posisi dilembaga legislatif, militer, lingkungan diplomatik atau struktur kepartaian. Ada semacam hierarki yang semakin berlapis-lapis. Setiap anggota elite tidaklah sama status dan pengaruhnya.

Pemahaman bahwa elite itu bukan sosok yang tunggal membawa berbagai implikasi rumit. Setiap elite mempunyai cara tersendiri dalam memelihara perannya. Elite komunikasi, misalnya, cenderung saling mendukung untuk memelihara dominasinya. Namun elite birokrasi tingkat daerah jelas tidak dimungkinkan untuk saling berkomplot untuk memelihara posisi mereka.

Elite harus dipelajari dalam konteks keragaman. Jika tidak, maka hasilnya akan menyederhanakan permasalahan secara berlebihan. Kalau ditinjau berdasarkan cara operasinya, ada dua macam elite, yakni elite kerja karakterisasi dan elite kerja survei. Yang pertama menekankan fungsi atau fungsinya, sehingga peran individunya menonjol, sedangkan yang kedua bertumpu pada kedudukannya dalam tatanan masyarakat yang lebih luas sehingga peran

lembaganya lebih mencolok ketimbang orangnya

Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat di hindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. manakala manusia mencoba menentukan posisinya dalam masyarakat, mana kala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan mana kala mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik. Dalam pengertian yang luas itu, setiap orang adalah politisi.

Meski begitu Aristoteles berkesimpulan, satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi meskipun sebagian (pejabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila di dibandingkan dengan yang lainnya¹⁹.

Antara abad XVI sampai awal abad XX, istilah politik lebih diartikan secara lebih sempit di bandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean bodin (1530-1596), seorang filosof politik perancis, memperkenalkan istilah 'ilmu politik' *science politique*. Tetapi karena ia seorang pengacara , sorotannya mengenai ciri-ciri negara menyebabkan ilmu politik menjadi terkait dengan organisasi dari lembaga yang mempunyai sangkut paut dengan hukum.

¹⁹ Bodin, Jean. *Recherches de la Politique*. Paris: Les Editions de la Pléiade, 1963.

Defenisi tentang yang lebih formal dan terbatas ini diperkukuh oleh filusuf Perancis yang lainnya, yaitu Montesque (1689-1755), yang mengemukakan bahwa secara fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam katagori legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Katagori ini mendapatkan tempat dalam konstitusi Amerika serikat termasuk asumsi Montesque bahwa kebebasan aka terjamin dengan adanya pembagian fungsi yang berbeda pada lembga-lembaga pemerintahan yang terpisah.

Sementara lokal sendiri dapat didefenisikan sebagai ruang atau tempat lokal juga dapat didefenisikan sebagai bagaian dari ruang yang luas²⁰. Untuk itu menurut hemat penulis politik lokal dapat didefenisikan sebagai keseluruhan struktur pola tingkah laku yang berkaitan dengan aktifitas politik dengan batasan ruang yang telah terlembagakan dan telah terkonstruksi melalui proses komunikasi dengan kearifan lokal yang melahirkan identitas politik baru. Perpolitikan lokal tentunya mengalami berbagai kontradiksi yang kemudian dihadapi sebagai satu kesatuan proses politik itu sendiri. Lokalitas politik tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ia dipengaruhi oleh faktor eksternal yang nantinya kemudian akan mempengaruhi corak baru politik.

²⁰ D. ...

F. DEFENISI KONSEPSIONAL

1. Struktural konflik adalah satu teori dalam ilmu sosial yang memandang bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh stuktur dan melihat bahwa konflik adalah gejala yang selalu melekat didalam setiap mayarakat dan setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Teori ini juga mengkritik teori sosial sebelumnya yaitu teori stuktural fungsional yang dianggap cenderung *pro* kepada status Quo.
2. Teori struktural fungsional memiliki pandangan bahwa pengetahuan dan masyarakat dalam proses transisi secara evolusi. Tugas teori sosial dalam hal ini kemudian adalah memahami faktor-faktor yang tak terelakkan dan memang diperlukan bagi tumbunya sejarah evolusi masyarakat. Muara dari semua itu adalah untuk membawa kehidupan masyarakat dalam tertib sosial yang baru . Evolusi menuju tertib sosial baru itu ditempuh melalui hukum tiga tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik atau abstrak, atau tahap ilmiah atau positif, yakni sebuah sebab atau awal dan akhir dari suatu fenomena dan semesta ini (universe). Positivisme memberikan kunci pencapaian tujuan manusia, dan ia merupakan satu-satunya formasi sosial yang betul-betul bisa dipercaya keandalan dan akurasinya yang seharusnya dipegang oleh semua manusia.
3. Kausalitas adalah sebagai kondisi yang memadai (jika ada sebab maka ada akibat) juga tidak berarti hubungan yang mesti ada. Kondisi yang memadai maksudnya adalah bahwa suatu kondisi tertentu selalu diikuti oleh akibat-akibat tertentu pula (menyialk kepada pandangan kaum Empirisme)

4. Teori elite menjelaskan bagaimana elite diistilahkan sebagai orang yang memegang posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lainnya melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Meskipun dipandang sebagai sebuah kelompok yang padu, masing-masing anggota elite itu sendiri-apalagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan.
5. Politik lokal adalah keseluruhan struktur pola tingkah laku yang berkaitan dengan aktifitas politik dengan batasan ruang yang telah terlembagakan yang telah terbentuk melalui komunikasi dengan kearifan lokal yang kemudian melahirkan identitas politik lokal.

G. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gejala-gejala, fakta, fenomena dan relasi dalam masyarakat secara objektif sehingga dapat dipahami situasi-situasi yang tengah terjadi. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan penelitian jenis kualitatif gejala-gejala dalam masyarakat dapat didalami dengan menginterpretasikan masalah atau

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Riau dan sekitarnya yang kebetulan sampai hari ini menjadi tempat berdomisili tokoh yang menjadi objek penelitian kami. Dan banyak aktor-aktor lain (tokoh) yang berdomisili di kota itu yang kemudian akan sangat membantu bagi pengumpulan data dalam penelitian ini serta Pekanbaru sendiri merupakan Ibu kota dari Propinsi Riau.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini kami menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pelaku politik, untuk memperoleh data ini kami melakukan wawancara dan observasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

4.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos) dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis; kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya tersebut kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, artinya peneliti berhadapan langsung

dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden di catat oleh pewawancara²¹.

Wawancara dilakukan terutama adanya anggapan bahwa hanya respondenlah yang mengetahui tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak diperoleh melalui alat lain akan diperoleh dengan melakukan wawancara.

4.2. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti mengamati gejala yang akan diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi dicatat untuk selanjutnya catatan tersebut dianalisis²². Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

4.3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencatatan-pencatatan dari catatan-catatan atau dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka analisa data yang diambil yaitu teknik analisa kualitatif, yaitu:

²¹ Adi Pianto, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gajah Mada, 2004, hal. 173

menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan berdasarkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data²³. Menurut Koentjaraningrat, teknik analisis data kualitatif adalah :

Data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit serta data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan teknik ini maka data yang diperoleh penulis pun merupakan data-data yang berupa tulisan, informasi, pendapat para pakar serta literatur-literatur lain. Dari sinilah kemudian penyusun mendeskripsikan peran elit lokal terhadap perpolitikan daerah studi kasus Ismail Suko.